

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN**

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI

- 1. Nama Organisasi** : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
- 2. Mendukung Misi Kab. Ngawi** : Mendukung misi ke-3 " Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima"
- 3. Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima
- 4. Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- 5. Fungsi** :
 - a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Keuangan
 - b. Penyusunan kebijakan teknis urusan keuangan dan barang milik Daerah
 - c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik Daerah
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik Daerah
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik Daerah
 - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- 6. Kewenangan** :
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- f. Penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - g. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Penyusunan dan melaksanakan kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - k. Penyusunan Laporan semester I (satu) dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - l. Melaksanakan Pemungutan pendapatan Daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan Daerah;
 - m. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - n. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi Daerah;
 - o. Melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
 - p. Melakukan penagihan piutang Daerah;
 - q. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - r. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik Daerah;
 - s. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - t. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - u. Penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET TAHUNAN					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	$\sum \text{nilai tiap komponen} \times \text{bobot}$ Penjelasan : - Komponen 1. Perencanaan Kinerja bobot 30 % 2. Pengukuran Kinerja, bobot 30 % 3. Pelaporan Kinerja, bobot 15 % 4. Evaluasi Internal, bobot 25 %	80	80,25	80,50	80,75	81,00	Sekretariat	Nilai LHE SAKIP
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap APBD	$\frac{\sum PAD}{\sum APBD \text{ (Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$	11,77%	12,05%	12,66%	13,08%	13,52%	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen APBD
3.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	$\frac{\sum \text{Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP}}{\sum \text{Laporan Keuangan Daerah}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi	Laporan Keuangan
			Penjelasan :							

			- Laporan Keuangan Daerah terdiri : 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 6. Laporan Arus Kas (LAK) 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)							dan Pelaporan Daerah	
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	$\frac{\sum BMD \text{ yang tertib}}{\sum BMD} \times 100\%$	95,05%	95,10%	95,15%	95,20%	95,25%		Bidang Pengelolaan BMD	Laporan BMD

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. TRI PUJO HANDONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660409 198602 1 002